



Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Garut

Heni Hanipah¹; Wati Susilawati²; Irma Rosmayati³

¹Universitas Garut

24022120013@fekon.uniga.ac.id

²Universitas Garut

w.susilawati@uniga.ac.id

³Universitas Garut

i.rosmayati@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan dengan dua jenis sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (verivication). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kebijakan menunjukkan hasil yang baik sedangkan untuk akuntabilitas program dinilai baik tetapi pada alternatif programnya masih belum mampu memenuhi tujuan program begitupun dengan akuntabilitas financial dianggap kurang baik karena masih harus melakukan transparansi yang sesuai dengan mekanisme.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Bantuan Operasional Sekolah

Abstract

This research aims to determine the accountability of the implementation of school operational assistance funds at SMK Muhammadiyah 1 Kadungora. The method used is a descriptive method with a qualitative approach with two types of data sources, namely secondary data and primary data. Data collection techniques use literature study and field research which includes interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data display (data presentation) and conclusion drawing (verification). The results of the research show that legal accountability and honesty, managerial accountability and policy accountability show good results, while program accountability is considered good but the alternative program is still not able to fulfill the program objectives, as well as financial accountability is considered not good because it has to carry out transparency in accordance with the mechanism.

Keywords: Accountability, School Operational Assistance Funds

1 Pendahuluan

Tahapan dalam menentukan pilihan terkait dengan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dijalankan melalui kontribusi melibatkan tim pengelola BOS, dewan pendidik, dan komite institusi. Setiap resolusi yang diambil direkam dalam dokumen resmi dan divalidasi melalui tanda tangan anggota yang hadir. Dana BOS, yang dialokasikan untuk berbagai inisiatif seperti orientasi siswa baru, peningkatan fasilitas perpustakaan, kegiatan belajar, dan program ekstrakurikuler, seringkali tidak mencukupi untuk semua keperluan. Dana ini juga dialokasikan untuk manajemen sekolah, pengembangan keahlian pendidik, biaya langganan utilitas, pemeliharaan infrastruktur, serta inisiatif untuk memperkuat keterampilan vokasional dan meningkatkan prospek kerja bagi alumni. Penyusunan laporan pertanggungjawaban merupakan tahap yang diikuti setelah alokasi dana BOS.

Implementasi dan pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS SMK) wajib disesuaikan berdasarkan kebijakan yang diatur oleh pemerintahan melalui petunjuk teknis BOS SMK, dengan memprioritaskan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pengelolaan dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis BOS SMK mencakup tujuh prinsip, yaitu swakelola dan partisipatif, keterbukaan, pertanggungjawaban, demokrasi, efektivitas dan efisiensi, keteraturan administrasi dan pelaporan, serta kepercayaan antar pihak.

Berdasarkan proses wawancara terhadap pemimpin sekolah Bersama bendahara yang merupakan pengelola dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada akuntabilitas finansial menunjukkan kurangnya transparansi sehingga tidak ada pemasangan papan informasi terkait dengan dokumen realisasi penggunaan dana BOS dan rekapitulasi realisasi pemanfaatan dana BOS, dan akuntabilitas program dalam pengelolaan anggaran BOS di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora masih belum mampu memenuhi tujuan program BOS di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora dari tanggungan pendanaan untuk operasional sekolah yang belum dapat dipenuhi secara keseluruhan untuk mencakup keseluruhan kebutuhan operasional sekolah secara efisien.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab dari kelompok yang ditugaskan (agen) untuk memberi penjelasan, menyampaikan, melaporkan semua tindakan serta kegiatan yang merupakan kewajibannya kepada pihak yang memberi tugas (prinsipal) yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut penjelasan tersebut. (Mardiasmo, 2017)

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Keteguhan moral serta tanggung jawab legal adalah kewajiban yang harus diemban oleh institusi politik untuk melakukan aksi-aksi mereka secara etis dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penggunaan dana negara harus dijalankan secara sah dengan mendapatkan otorisasi atau konfirmasi yang relevan, yang sering kali berkaitan dengan adanya kepatuhan pada panduan teknis yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial melibatkan kewajiban lembaga publik dalam mengatur organisasi dengan cara yang maksimal dan ekonomis. Ini mencakup pertanggungjawaban terkait pelaksanaan dan penyusunan laporan, termasuk realisasi anggaran yang mencakup penerimaan dana dan penggunaannya.

Akuntabilitas Program

Evaluasi program mencakup analisis keberhasilan dalam mencapai target yang ditentukan, serta pertimbangan terhadap opsi lain yang mungkin lebih efisien dalam menghasilkan manfaat maksimal dengan pengeluaran yang paling ekonomis. Tanggung jawab perencanaan didasarkan pada pembuatan RKAS yang mengikuti skala prioritas. Lembaga sektor publik harus mampu mempertanggungjawabkan rencana yang telah dibuat dan mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

Akuntabilitas Kebijakan

Tanggung jawab kebijakan menuntut bahwa institusi pemerintahan harus dapat menjelaskan dan membenarkan keputusan yang dibuat dengan memperhatikan konsekuensi jangka panjangnya.

Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas finansial melibatkan kewajiban lembaga dalam mengelola dana publik dengan bijaksana, maksimal dan ekonomis. Hal ini juga mencakup pencegahan pemborosan, penyimpangan dana, dan praktik korupsi. Akuntabilitas finansial juga berhubungan dengan transparansi dan mekanisme yang terlibat.

2.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirancang oleh pemerintahan sebagai inisiatif untuk menyediakan dukungan finansial kepada institusi pendidikan di Indonesia. Fokus utama program ini adalah pada pembiayaan kebutuhan operasional yang tidak termasuk gaji personel di lembaga pendidikan dasar. Pengeluaran non-operasional termasuk biaya untuk materi dan peralatan pendidikan yang bersifat konsumtif, serta pengeluaran lainnya seperti biaya utilitas (listrik dan air), layanan komunikasi, pemeliharaan gedung dan infrastruktur, kompensasi lembur, transportasi, konsumsi, retribusi, dan sebagainya.

Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah, pemerintah telah menetapkan prinsip-prinsip utamanya, yakni:

- 1) Penyesuaian nilai biaya BOS sesuai dengan ciri-ciri setiap wilayah
- 2) Fleksibilitas dalam pemanfaatan dana BOS
- 3) Dana BOS dapat dipergunakan sebagai keperluan persiapan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
- 4) Pelaporan penggunaan dana BOS dilaksanakan secara daring
- 5) Pelaporan penggunaan dana BOS secara daring dilakukan melalui situs web kemdikbud.go.id
- 6) Untuk menjamin distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di fase selanjutnya, laporan adalah syarat mutlak. Besaran dana Bos yang rutin diberikan berdasarkan perhitungan dengan mengalikan jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik dengan biaya unit per level pendidikan. Penting untuk diingat bahwa besaran biaya BOS bisa berbeda-beda di tiap sekolah, tergantung pada lokasi, dan kalkulasinya didasarkan pada dua pendekatan yang tidak sama:
 - a) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistika

- b) Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan total siswa yang terdaftar per sekolah yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

2.3 Kerangka Pemikiran

Manajemen anggaran di sekolah sebagai lembaga sektor publik melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Tingkat akuntabilitasnya harus dicapai agar sektor publik efektif dan efisien sesuai prinsip sektor publik. Program BOS, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk lembaga pendidikan sebagai sektor publik, harus dikelola sesuai petunjuk teknis dan kaidah akuntansi sektor publik, menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, pelaksanaan BOS harus memperoleh akuntabilitas melalui beberapa sistem, seperti penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran. Pihak yang mengelola dana BOS harus mentaati petunjuk teknis, memastikan tanggung jawab manajerial dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan, serta bertanggung jawab terhadap perencanaan dan evaluasi program. Akuntabilitas kebijakan juga diperlukan, di mana penyelenggara harus memprioritaskan pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan untuk masa depan. Selain itu, transparansi finansial penting, di mana penyelenggara harus mempublikasikan hasil pelaksanaan anggaran BOS kepada masyarakat. Jika akuntabilitas ini terpenuhi, akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sebagai lembaga sektor publik. Menurut (Mardiasmo, 2006) Akuntabilitas terdiri dari beberapa yaitu :

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas hukum dan integritas merupakan kewajiban bagi badan-badan politik agar bertindak dengan integritas dalam pekerjaan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pemanfaatan dana publik harus dilakukan dengan sesuai dan setelah memperoleh izin atau persetujuan yang sesuai, mengacu pada kepatuhan terhadap petunjuk teknis atau juknis.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial merupakan kewajiban bagi institusi publik guna mengelola organisasi dengan cara optimal dan tepat sasaran. Ini melibatkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan, termasuk realisasi anggaran yang mencakup penerimaan dana dan penggunaan yang sudah terjadi.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program memiliki keterkaitan dengan evaluasi apakah sasaran yang direncanakan dapat terlaksana atau tidak, serta apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang menghasilkan hasil maksimal dengan penggunaan dana yang efisien. Dalam tanggung jawab perencanaan yang berdasar pada pembuatan RKAS dan mengikuti skala prioritas, lembaga sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban rencana yang disusun dan mengevaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan.

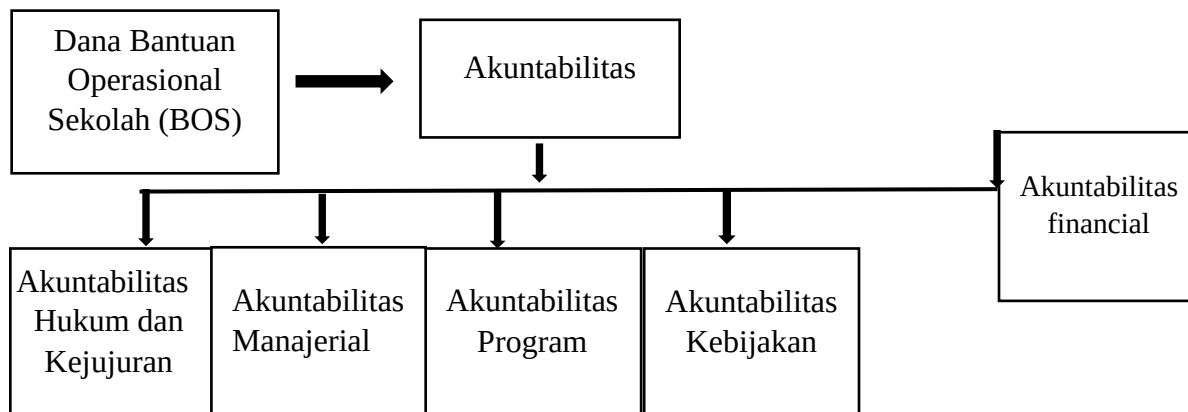
4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kewajiban institusi publik untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diimplementasikan. Badan-badan publik diharapkan dapat memberikan alasan yang masuk akal untuk kebijakan yang sudah diambil dengan memperhatikan pengaruh di masa depan.

Pertimbangan ini mencakup konsekuensi positif dan negatif berdasarkan pelaksanaan yang sudah ditentukan.

5) Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas finansial melibatkan kewajiban lembaga dalam mengaplikasikan anggaran publik dengan hemat, optimal dan tepat guna. Selain itu, akuntabilitas finansial juga bertujuan untuk mencegah pemborosan, penyimpangan dana, dan praktik korupsi. Konsep ini erat kaitannya dengan transparansi dan mekanisme yang menjamin pemanfaatan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

3 Metode Penelitian

Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan dua jenis sumber data yang diterapkan berupa data primer dan data sekunder. Studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan metode semi stuktur dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (verification) dengan teknik keabsahan data menggunakan teknis triangulasi.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Untuk menganalisis akuntabilitas pelaksanaan dana BOS, penelitian ini diukur dengan menggunakan wawancara kepada pimpinan sekolah, bendahara, komite, guru dan orang tua siswa dengan beberapa dimensi yaitu Akuntabilitas hukum dan kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas program, Akuntabilitas kebijakan, dan Akuntabilitas finansial yang meliputi:

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Berdasarkan wawancara dengan para responden secara keseluruhan mengenai berperilaku jujur, menaati peraturan hukum, penggunaan anggaran publik dan mendapatkan otorisasi dapat disimpulkan bahwa SMK

Muhammadiyah 1 Kadungora mengelola dana BOS dengan jujur dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Sikap ini memotivasi semua pihak yang terlibat untuk menaati aturan penggunaan dana BOS, sehingga mendapat kepercayaan dari pemerintah dan pihak lain. Sekolah ini telah mendapatkan otorisasi untuk pencairan dana BOS, memastikan kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang berlaku. Pengelolaan anggaran BOS di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora dilakukan dengan baik, menjamin kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini telah sesuai dengan teori (Mahmudi, 2015) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran yang baik adalah badan-badan politik yang harus bertindak jujur dan mematuhi hukum. Pengeluaran anggaran publik harus dilaksanakan dengan benar serta sesuai izin, mematuhi petunjuk teknis.

Akuntabilitas Manajerial

Berdasarkan wawancara dengan para responden secara keseluruhan mengenai pengelolaan organisasi secara efisien, pengelolaan organisasi secara efektif, pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dan pertanggungjawaban penyusunan laporan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran BOS di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora sudah efisien karena dilihat dari laporan perencanaan dengan penggunaan dana BOS sudah sesuai. Penggunaan anggaran BOS di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora juga sudah dikatakan efektif karena dalam perencanaan penyusunan penggunaan dana BOS sudah ada alokasi terhadap bidang mana yang akan menjadi target dalam penggunaan dana BOS begitupun dengan petunjuk teknis, SMK Muhammadiyah 1 Kadungora sudah menjalankan ketentuan yang ada yang terdiri atas sejumlah tahapan, dimulai dari proses penyaluran dana BOS, penyaluran anggaran BOS, hingga pemanfaatannya dan pembukuan dana BOS. laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk keterbukaan telah dilaksanakan sekolah sesuai dengan juknis anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) yaitu wajib transparan terhadap pelaporan keuangan dana BOS.

Akuntabilitas Program

Berdasarkan wawancara dengan para responden secara keseluruhan mengenai pertimbangan tujuan yang ditetapkan, mempertimbangkan alternatif program, tanggungjawab perencanaan dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 1 Kadungora terealisasi dengan optimal sesuai peraturan yang berlaku dan diawasi oleh inspektorat dalam pelaksanaan monitoring. Meskipun tujuan telah ditetapkan dengan tepat, pengelolaan anggaran BOS di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora belum berhasil sepenuhnya merealisasikan tujuan dari program BOS di sekolah tersebut. Meskipun demikian, dalam tanggung jawab perencanaannya selalu dilakukan rapat dengan tujuan dia untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan guru dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran.

Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan wawancara dengan para responden secara keseluruhan mengenai tanggungjawab kebijakan dan konsekuensi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 1 Kadungora menurut hasil wawancara antara peneliti dengan bendahara BOS terkait dana BOS yaitu akuntabilitas kebijakan telah dilaksanakan secara optimal. Hal itu terlihat dari kinerja organisasi yang berupaya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Konsekuensi yang diterapkan oleh SMK Muhammadiyah 1 Kadungora juga telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada karena mengacu pada Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII huruf B. Hal tersebut sejalan dengan teori yang diajukan oleh (Mahmudi, 2015), yang menjelaskan bahwa salah satu ciri akuntabilitas kebijakan adalah penerapan konsekuensi yang tepat.

Akuntabilitas Financial

Berdasarkan wawancara dengan para responden secara keseluruhan mengenai transparansi dan mekanisme dapat disimpulkan bahwa transparansi di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora dianggap kurang optimal karena masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh ketidaksepakataan pendapat antara tim BOS yaitu kepala sekolah dan bendahara. Mekanisme sekolah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas financial, dapat dipertanggungjawabkan dengan cukup baik dimana pihak sekolah sudah mengikuti aturan yang berlaku atau kesesuaian dengan aturan yang ada.

5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pelaksanaan dana BOS di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora Kabupaten Garut dapat dianggap baik, hal ini terlihat dari Akuntabilitas hukum dan kejujuran SMK Muhammadiyah 1 Kadungora memiliki sikap jujur karena telah menjalankan semua ketentuan yang harus dan wajib dilaksanakan oleh setiap sekolah yang menerima dana BOS, Akuntabilitas manajerial yang dilihat dari pertanggungjawaban pelaksanaan dana BOS dan pertanggungjawaban penyusunan laporan sudah dikatakan baik dimana pengelola sekolah melakukan pelaksanaan yang sejalan dengan RKAS yang telah dibuat dalam tanggungjawab penyusunan laporan BOS yang dilaporkan ke dinas Pendidikan dan juga lapor ke website BOS ke <http://bos.kemdikbud.go.id>, Akuntabilitas program yang dilihat dari tanggungjawab perencanaan dana BOS dan evaluasi yang sudah dilakukan dengan baik karena dalam perencanaan pihak sekolah mengadakan rapat Bersama TIM manajemen BOS sekolah beserta elemen sekolah, evaluasi dilakukan oleh tim manajemen sekolah bersama inspektorat, tetapi dilihat dari pertimbangan alternatif program masih belum mampu memenuhi tujuan program BOS di SMK Muhammadiyah 1 Kadungora karena biaya operasional sekolah yang masih tinggi dan belum dapat menutupi seluruh pengeluaran sekolah secara efisien, Akuntabilitas kebijakan dinilai baik yang dilihat dari kebijakan yang diambil sekolah dalam menentukan skala prioritas kebutuhan sekolah dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dalam RKAS dan konsekuensi berdasarkan hasil pelaksanaan dan pelaporan, dan Akuntabilitas financial yang berkaitan dengan transparansi dan mekanisme, Dimana pihak sekolah harus melakukan transparansi dengan memasang dokumen realisasi penggunaan dana BOS dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS pada papan informasi, pihak sekolah tidak memasang dokumen tersebut namun diinformasikan saat rapat tahunan Bersama orang tua siswa, mekanisme dapat dilihat dari RKAS yang dibuat dan Realisasi Penggunaan dana BOS, maka akuntabilitas financial dinilai kurang baik.

5.2 Saran

Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas financial pada pelaksanaan dana BOS, terkait dengan transparansi pihak sekolah seharusnya memasang dokumen realisasi penggunaan dana BOS dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS pada papan informasi setiap selesai pelaporan atau setiap selesai triwulan karena hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis, agar pihak sekolah maupun orang tua murid dapat mengetahui informasi realisasi pengelolaan anggaran BOS yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah, sehingga hal ini dapat meningkatkan citra baik sekolah.

Dalam akuntabilitas program yang mempertimbangkan alternatif program dana BOS, sekolah disarankan untuk mempertimbangkan pengelolaan dana alternatif program dengan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tujuan program tercapai secara efektif.

Bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan penelitian yang sama tentang akuntabilitas pelaksanaan anggaran, maka dapat melakukan kajian di bidang akuntabilitas kebijakan.

Daftar Pustaka

- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021. *Risma*, 2(1), 166-174.
- Arismun, Rusdiana, Deriyanto, & Murtafiah, N. H. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional di SMP Negeri 2 Bandarlampung. *Cendikia: jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(4), 330-336.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Masyitah. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus di SDN NOMOR 41 Birue Kabupaten Barru). *Meraja Journal*, 2(2), 185-201.
- Novita, S. R., Swendra, W., & Yuliantini, N. N. (2019). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SDN 1 BEBALANG BANGLI TAHUN 2015. *Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 7, 80–88.
- Putri, N. T. K., & Atmadja, A. T. (2022). Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAN 1 Singaraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 99–107.
- Sine, E. P. T., Tunti, M. E. D., & Rafael, S. J. M. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Sekolah di Kota Kupang). *Akuntansi*, 9(1), 1–8. <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Trihantoyo, S. (2015). Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja. *Widyagogik*, 3(1), 90–102.